



Realokasi Tembus Rp521 Miliar

PELAKSANAAN RPJMD 2021:

- Penguatan Ketahanan Perekonomian Daerah Pasca Pandemi Covid-19.
- Memperkuat Sektor Pertanian dan Pariwisata.
- Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Penyediaan SDM Promotif dan Preventif, dan Sarpras Kesehatan.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan.
- Memperkecil Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- Pencapaian 100-0-100 Infrastruktur (Air Bersih-Kawasan Kumuh-Sanitasi), Infrastruktur Konektivitas Wilayah, dan Energi.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi Berbasis Elektronik.
- Disetujui Jembatan Bitung-Lembeh.
- Disetujui Tol Minut-Minahasa-Minsel.

* SUMBER: MUSRENBANG RKPD PROVINSI SULUT, SELASA (28/4). DILAH MANADO POST

♦ Urus Covid-19 di Sulut

EDITOR: GRAND REGAR
PELIPUT: BALADEWA SETLIGHT

MANADO—Anggaran penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Utara (Sulut) bertambah. Hal ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut, melalui video teleconference dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.



Vicon tersebut diikuti Gubernur Sulut Oly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. Berbagai kesepakatan dan pelaksanaan dibahas dalam Musrenbang. OD mengatakan dua hal penting

mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Sulut tahun 2021, telah dibahas secara bersama.

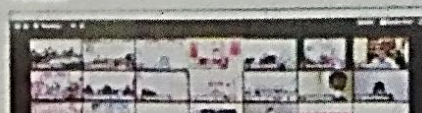
► Baca **REALOKASI**...Hal.11



DOK HUMAS

KOORDINASI:

Gubernur Sulut Oly Dondokambey (foto bawah) dan Wagub Steven Kandouw, Selasa (28/4) kemarin, melakukan koordinasi dengan Bapennas dalam Musrenbang.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Manado Post (Hal. 1_2)

Rabu, 29 April 2020

REALOKASI...

Sumbangan Dari Hal: 1

OD mengungkapkan, pemprov maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD. Yang diantaranya digunakan untuk membantu masyarakat yang berada di golongan pendapatan terendah yang berjumlah 741.342 orang atau 182.026 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

"APBD Provinsi Sulut mengalokasikan anggaran sebesar Rp171,5 miliar. Jika dijumlahkan kekuatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut, ada kurang lebih Rp521 miliar yang menjadi refocusing dan realokasi APBD Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19. Saya menyampaikan apresiasi kepada bupati dan wali kota yang telah melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran APBD 2020 dan mengajak kita semua untuk bangkit dan berkolaborasi dalam menangani pandemi ini," ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut dua pekan lalu, total anggaran yang disiapkan berjumlah Rp404 miliar. Menurut OD, penanganan Covid-19 di Sulut dilaksanakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Yaitu ditujukan untuk bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi. OD juga mengatakan, ada sembilan kelompok besar masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Rata-rata bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan skala Usaha Mikro dan Kecil, pekerja yang bergerak di bidang pertanian skala Usaha Mikro dan Kecil, pekerja yang bergerak di bidang pariwisata skala Usaha Mikro dan Kecil, pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala Usaha Mikro dan Kecil.

"Kemudian pekerja yang bergerak di bidang industri skala Usaha Mikro dan Kecil, penduduk yang bekerja sebagai

pemulung, penduduk lanjut usia, penduduk dengan kebutuhan khusus (Disabilitas) dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, suspect dan terinfeksi Covid-19," paparnya.

Kemudian dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2021, Sulut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan tema pembangunan, mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat, dengan fokus, pemulihan industri, pariwisata dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional. "Sebagaimana tertuang dalam rancangan RKP Tahun 2021, Sulut menetapkan tema pembangunan tahun 2021 yaitu, mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat didukung pengembangan pariwisata dan industri berbasis sumberdaya lokal," paparnya.

Tambah dia, tahun 2021 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka prioritas pembangunan di Sulut diarahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD tersebut dengan fokus terhadap tujuh isu strategis. "Yaitu penguatan ketahanan perekonomian daerah pasca pandemik Covid-19, memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, penyediaan SDM promotif dan preventif, dan sarpras kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, memperkecil tingkat pengangguran terbuka (TPT), pencapaian 100-0-100 infrastruktur (Air Bersih-Kawasan Kumuh-Sanitasi), infrastruktur konektivitas wilayah, dan energi, dan peningkatan kualitas pelayanan birokrasi berbasis elektronik," ungkapnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly menerangkan kondisi global pandemi Covid-19 ini mempengaruhi pencapaian target pembangunan makro yang

telah ditetapkan. Sehingga akan dilakukan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembangunan Sulut, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, PDRB, inflasi dan indeks pembangunan manusia (IPM).

"Kekuatan ekonomi Sulawesi Utara bertumpu pada sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur ekonomi daerah. Karena itu, apabila semua Kabupaten/Kota terus mendorong sektor pertanian sehingga dapat tumbuh secara positif, maka saya optimis Sulawesi Utara Tahun 2021 dapat bertumbuh positif diatas rata-rata nasional. Menjadi harapan kami, Pemerintah dan Masyarakat Sulut, boleh menjadi provinsi yang memberikan kontribusi positif untuk pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju melalui transformasi ekonomi," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, dari hasil Musrenbang, Jembatan Bitung-Lembah dan Tol Manado Amurang disetujui. "Jadi usulan Pak Gubernur Olly Dondokambey, terkait tol tiga daerah dan pembangunan Jembatan Bitung-Lembah telah disetujui Bappenas. Untuk trase sudah ada, sehingga pembebasan lahan kedepan sudah bisa dilakukan. Yang pasi, buku biru Bapenas sudah masuk untuk dua pembangunan tersebut," bebernya.

Selain Jembatan Bitung-Lembah dan Tol Minut-Minaha-Minsel, Kandouw juga mengatakan, Kepala Bapenas masih memberikan kesempatan Gubernur untuk mengusul lima kegiatan berskala besar. "Kalau bukan Gubernur OD yang menjabat sebagai gubernur jangan harap itu semua disetujui pemerintah pusat. Jadi nanti pemerintah pusat akan mengkaji apa lima kegiatan berskala besar yang akan diberikan lagi," tandas Kandouw. (***)